Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA

UPMI MEDAN

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RENIP) 2020-2040

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA



TIM PENYUSUN

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

Penanggung jawab Rektor

Dr. H. Ali Mukti Tanjung, S.H., M.M

Dekan

Budi Alamsyah Siregar, S.E., M.M.

Anggota

Dewi Suma, S.E., M.M.
Ahmad Karim, S.E., M.Si.
Reza Nurul Ichsan, S.E., M.M.

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
KAMPUS I : Jl. Teladan No 11 – 15 Medan
KAMPUS II: Jl. SM. Raja Km 9 / Jl. Balai Desa Pasar 12 Marindal II Medan
Website : www.upmi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor :028/06-D/FE-UPMI/I/SK/2020

TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RENIP) PERIODE 2020-2040 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

Dekan Fakultas Ekonomi UPMI Medan

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menjamin Efektivitas dan Kualitas Mutu Fakultas Ekonomi UPMI, maka diperlukan adanya Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Periode 2020-2025 Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
2. Bahwa Ketentuan Dan Keputusan Ini Harus Diikuti Dan Ditaati Sebagaimana Mestinya.
3. Sehubungan Dengan Poin Pertama Dan Kedua, Maka Perlu Diatur Dengan Surat Keputusan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tenatng Sistem Pendidikan Tinggi Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
6. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan
9. Rencana Induk Pengembangan Fakultas Ekonomi UPMI Periode Tahun 2020-2040

MEMPERHATIKAN : Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan masyarakt Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi UPMI Medan Tentang Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Periode 2020-2025 Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
Pertama	:	Melaksanakan kegiatan Fakultas Ekonomi dalam Jangka Menengah Maka diperlukan adanya Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Periode 2020-2025 Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan.
Kedua	:	Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka implementasi Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Periode 2020-2025 Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Menjadi Tanggungjawab Fakultas Ekonomi dan setiap unit di Fakultas Ekonomi wajib melaksanakan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Periode 2020-2025 Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, serta Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran Fakultas Ekonomi UPMI Medan.
Ketiga	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 30 Januari 2020
Dekan FE UPMI,

Dr. Alamsyah Siregar, S.E., M.M.

Tembusan :

1. Rektor UPMI
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Ketua Prodi S1 Manajemen
5. Ketua Unit Kerja Fakultas Ekonomi
6. Dosen Fakultas Ekonomi
7. Pertinggal.

DAFTAR ISI

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) 2
Penanggung jawab Rektor 2
DAFTAR ISI 9
..... 5
BAB 1 PENDAHULUAN 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Landasan Hukum..... 9
BAB 2 10
2.1 Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr. Soebandi 10
2.2 Nilai dasar 14
2.3 Visi Misi dan Tujuan FE UPMI.....15
2.3.1 Visi.....15
2.3.2 Misi 15
2.3.3 Tujuan.....16
2.4. Fungsi dan Tujuan Nilai dasar 16
BAB 3 ANALISIS LINGKUNGAN 17
3.1 Analisis Lingkungan Eksternal 17
3.1.1 Faktor Ekonomi 17
3.1.2 Faktor Sosial 17
3.1.3 Faktor Lingkungan 18
3.1.4 Faktor Teknologi.....18
3.1.5 Peluang (Opportunity).....18
3.1.6 Ancaman (Threat).....19
3.2 Analisis Lingkungan Internal 19
3.2.1 Visi, Misi, Tujuan ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 20
3.2.3 Mahasiswa 21
3.2.4 Sumber Daya Manusia.....21
3.2.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana 22

3.2.6 Pendidikan 23
3.2.7 Penelitian 24
3.2.8 Pengabdian Kepada Masyarakat 24
3.2.9 Luaran dan Capaian Tridharma 25
BAB 4 26
4.1 Matrik Analisis SWOT 27
4.1.1 Bidang Analisi SWOT Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 27
4.1.2 Bidang Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 28
4.1.4 Bidang Sumber Daya Manusia 33
4.1.6 Bidang Pendidikan 38
4.1.8 Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 44
4.2 Arah Pengembangan Universitas dr. Soebandi 48
4.2.3 Menuju Research University (2031 – 2035) 49
4.3.1 Bidang Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 51
4.3.3 Bidang Kemahasiswaan ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.3.5 Bidang Keuangan Sarana dan Prasarana ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.3.7 Bidang Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.3.9 Luaran ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB 5 ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.1 Bidang Visi Misi, Tujuan Dan Strategi ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.3 Bidang Mahasiswa ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.5 Bidang Keuangan, Sarana Dan Prasarana ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.7 Bidang Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.9 Bidang Luaran dan Tridharma ..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR PUSTAKA 74

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, rahmat dan karuniaNya, sehingga memberikan inspirasi tim penyusun untuk menyelesaikan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas Ekonomi UPMI 2020-2040. Rencana Induk Pengembangan ini akan menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika FE UPMI dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan operasional, sehingga menjadi searah dan terarah pada pencapaian visi, misi serta tujuan yang telah dijabarkan kedalam pengembangan sumberdaya, input, proses dan output dalam bentuk angka-angka yang dapat diukur pencapaiannya. Pada saat penyusunan Rencana Induk Pengembangan ini disusun pula Rencana strategis (Renstra) tahap pertama dan Rencana Operasional (Renop) dari masing-masing unit kerja mulai dari tingkat FE UPMI hingga ke tingkat program studi. Di samping itu, RIP ini disusun dalam rangka memenuhi standar akreditasi institusi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Arah pengembangan yang ingin dicapai Fakultas UPMI terdiri dari lima tahap yaitu: 1) Menjadi Teaching Faculty, 2) Sebagai Excellence Teaching Faculty, 3) Menuju Research Faculty, 4) Menjadi Excellence Research Faculty dan 5) Mewujudkan World Class Faculty (WCF). Arah pengembangan di tingkat Fakultas tersebut telah di eja wantahkan pada RIP FE UPMI, sebagai bentuk sinkronisasi kinerja dalam pencapaian bersama di semua program kerja FE UPMI. Pada tahap yang ke lima terwujudnya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis menjadi World Class Faculty sejalan dengan arah pengembangan Universitas dr. Soebandi menjadi World Class University akan dicapai pada tahun tarakhir yaitu tahun 2040, yang Insya Allah sebagai hadiah Tahun Emas HUT Kemerdekaan RI yang ke 100 pada tahun 2045. Aamiin. Diucapkan terima kasih kepada semua pihak sivitas akademika khususnya. Ketua Pengurus Yayasan UPMI-S, Para jajaran Rektorat, Senat, Dekanat, Kaprodi dan Para Ketua Lembaga serta UPT, biro, dan stakeholder lainnya yang telah memberikan masukan, kritikan dan harapan.Terutama tim penyelaras RIP 2020-2040 yang telah bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas sehingga dapat menyelesaikan RIP ini dengan baik. Akhir kata, RIP ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Aamiin.

Medan, 30 Januari 2020

Dekan FE UPMI



Budi Alamsyah Siregar , S.E., M.M

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan dan regulasi produk hukum berikutnya yang terkait dengan Pendidikan Tinggi yaitu Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12/2012, dan selanjutnya ditetapkannya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) No. 02 Tahun 2020 yang mengharuskan perguruan tinggi dalam pengelolaan kelembagaannya berdasarkan sepuluh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri dari: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Tujuan pendidikan nasional ialah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi pada masa depan.

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, maka perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus dapat: 1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta pengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan tarap kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia senantiasa berupaya untuk terus mengembangkan dirinya tetap berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, FE UPMI telah menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2020-2040 sebagai landasan pengembangannya. Keberadaan FE UPMI merupakan unit penyelenggara program studi dibawah penyelenggaraan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia di bawah naungan Yayasan UPMI-S.

Dalam RIP FE UPMI ini akan dijabarkan program-program strategis yang perlu dilaksanakan, dengan memperhatikan kondisi internal FE UPMI saat ini, di mana terdapat kekuatan dan kelemahan, serta kondisi eksternal FE UPMI yang ditandai dengan berbagai isu penting yang dapat menjadi peluang maupun ancaman FE UPMI dalam mencapai visi dan misi yang dimiliki. Kebijakan pengembangan merupakan bagian dari Strategi Jangka Panjang FE UPMI untuk mencapai visi sesuai RIP FE UPMI. Kebijakan ini juga merupakan

elemen dari misi FE UPMI untuk mewujudkan FE UPMI sebagai institusi pendidikan dan lembaga penelitian yang terkemuka di Indonesia untuk mendukung FE UPMI sebagai World Class Faculty (WCF) di masa mendatang.

Tujuan utama pengembangan adalah untuk meningkatkan peran FE UPMI dalam membangun riset ke depan dan berkontribusi untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam skala nasional dan internasional khususnya pendidikan dibidang ekonomi dan bisnis. Dalam rangka melaksanakan mandat dan mewujudkan visi FE UPMI tersebut, disusun Rencana Induk Strategi (RIP) FE UPMI yang inti substansinya bersumber pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam hal ini FE UPMI ikut bertanggung jawab untuk ikut menyelesaikan berbagai permasalahan akibat ketertinggalan bangsa ini dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. UDS juga bertanggung jawab kepada bangsa ini atas ketertinggalan kualitas sumber daya manusia sebagai tumpuan kekuatan daya saing bangsa Indonesia yang sering menjadi rujukan bagi berbagai unsur bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lain di dunia tentang Indonesia, maka selayaknya FE UPMI mempunyai arah pengembangan jangka panjang sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan dan program pengembangan dan pembangunan jangka pendek dan menengah, sekaligus yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi ketercapaiannya. Hal ini juga merupakan tanggung jawab dalam mewujudkan visinya sebagai perguruan tinggi yang terdepan di Indonesia.

Hingga saat ini pengakuan masyarakat terutama di Kota Medan dan wilayah sekitarnya atas UPMI telah menempatkan hampir semua lulusan UPMI pada posisi strategis sesuai arah jurusan yang ada di UPMI dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dengan demikian tanggung jawab UPMI dalam pendidikan bukan hanya sampai menghasilkan lulusan yang cerdas namun hingga menyentuh kontribusi lulusannya pada pembangunan budaya bangsa Indonesia pada dunia internasional. Dalam era Internasionalisasi saat ini institusi pendidikan menghadapi tantangan, tekanan liberalisme ekonomi, mobilitas tenaga didik yang terampil serta masuknya perguruan tinggi asing yang berkualitas. Oleh sebab itu perguruan tinggi dituntut untuk mengupayakan pengendalian kualitas, dengan melakukan monitoring dan evaluasi disertai pelaksanaan penjamin mutu pendidikan yang terukur.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) FE UPMI Tahun 2020-2040 mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi,

5). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6). Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

7). Instrumen Akreditasi BAN-PT 9 kriteria

8). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi

9). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 tentang akreditasi dan perguruan tinggi.

10). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

11). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

12). Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

13). RIP Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia 2020-2040

BAB 2
PROFIL PERGURUAN TINGGI

2.1 Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi UPMI

Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia atau lebih dikenal dengan FE UPMI Medan awalnya merupakan sebuah sekolah tinggi yang naungannya berada di bawah koordinasi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) yang terdiri dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan Sekolah Tinggi Pertanian. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YUPMI pertama sekali didirikan berdasarkan SK Mendikbud RI No. 0531/0/1985 tanggal 13 Nopember 1985 tentang pemberian Status Terdaftar bagi Program studi (prodi) Administrasi Negara Strata D3 dan Administrasi Niaga Program D III. SK Mendikbud RI No.0523/0//1989 tanggal 31 Agustus 1989, tentang pemberian Status Terdaftar Sekolah Tinggi Pertanian Jurusan Budi Daya Pertanian, SK Mendiknas RI No.0554/0/1989 tanggal 5 September 1989, tentang pemberian Status Terdaftar Sekolah Tinggi Teknik untuk Jurusan Teknik Mesin, SK Mendiknas RI No.0555/0/1989 tanggal 5 September 1989 tentang pemberian Status Terdaftar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi untuk Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Niaga Jenjang S.1 dan D.3, SK Mendikbud RI No. 0198/1991 tanggal 12

April 1991, tentang pemberian Status Terdaftar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi untuk Jurusan Manajemen.

Berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 0649/O/1991 tanggal 17 Desember 1991 tentang perubahan 4 sekolah tinggi di lingkungan YUPMI-S, maka keempat Sekolah Tinggi tersebut dilebur menjadi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YUPMI dilebur menjadi Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Teknik YUPMI menjadi Fakultas Teknik, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YUPMI berubah menjadi Fakultas Ekonomi, Sekolah Pertanian YUPMI menjadi Fakultas Pertanian. Perubahan ini juga diserta dengan keluarnya SK berdirinya Fakultas Hukum. UPMI terdiri dari jenjang S1 dan S2 yang memiliki 8 Fakultas dan 11 Program Studi yang terakreditasi BAN-PT dengan predikat B pada jenjang S1. Sementara untuk jenjang S2 yang berada di bawah Program Pascasarjana terdiri dari Magister Ilmu Administrasi (konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah, Administrasi Bisnis, dan Administrasi Pendidikan). Magister Imu Hukum (Konsentrasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Ekonomi).

Selaras dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia, UPMI berkeinginan menjadi perguruan tinggi yang futuristik, dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing. Dengan Daya saing ini dibentuk untuk membangun pengetahuan (tahu), kompetensi (bisa), dan kompetitif (berani). Tiga hal inilah yang akan membuat UPMI berdaya saing, sehingga mampu mengantisipasi kompetisi global di bidang pendidikan tinggi seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah dimulai padaTahun 2015. Untuk menjadi perguruan tinggi futuristik berdaya saing, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dibangun dengan konstruksi 3 pilar Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan 2 pilar lain yakni standar kualitas dan peraturan perundangan. Dinamika peraturan perundangan terkait dengan pendidikan tinggi semuanya bermuara pada kualitas. Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi sifatnya wajib (pasal 91 ayat 1) untuk memenuhi/melampaui Standar Nasional Pendidikan (pasal 91 ayat 2). Rekomendasi implementasi penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) melalui akreditasi (pasal 91 ayat 5) dan juga Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) seperti LAMEMBA

Sementara di dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi ditujukan untuk pendidikan bermutu (pasal 51 ayat 2).Perguruan tinggi harus secara sistematis melaksanakan proses penjaminan mutu

melalui Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) dan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) (pasal 52 ayat 3).Selanjutnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM PT) harus didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) (pasal 52 ayat 4). Adapun SPM-PT terdiri atas 2 jenis yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) (pasal 53). SPMI disusun oleh perguruan tinggi, sementara SPME oleh BAN-PT serta Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

Tuntutan kompetisi di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, serta tuntutan perundang-undangan, mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya segenap sivitas akademika Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia secara bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan SPMI dan SPME. Dengan Implementasi SPMI dan SPME dalam pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) akan menghasilkan budaya mutu. Indikator terbangunnya budaya mutu di UPMI dapat dilihat pada status Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dan Akreditasi Program Studi (AIPS) dari BAN-PT maupun dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); Klasifikasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi di Indonesia dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia masuk katagori Ranking *World Class University* (WCU) dan Ranking *Webometric*. Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar di era perdagangan bebas dan era globalisasi. Perkembangan masyarakat yang begitupesat dalam berbagai aspek kehidupan sebagai dampak dari kebutuhan hidup, pembangunan dan globalisasi menuntut penyelesaian yang sistematik dan terus menerus dalam menjawab tantangan kebutuhan jenis dan kualitas sumberdaya manusia.

Dalam era globalisasi, pendidikan tinggi akan mengalami kecenderungan perkembangan yang amat cepat dan dinamis sebagai konsekuensi dinamika peluang dan tantangan yang harus dihadapi baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu perguruan tinggi, termasuk Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus mampu menjawab tantangan masa depan tersebut dengan melaksanakan tugas, fungsi dan peran sebaik-baiknya. Agar upaya yang dilaksanakan dalam kurun waktu pada tahun 2020-2025 mendatang sesuai dengan kondisi dan perkembangan FE UPMI secara akurat, maka perlu disusun rencana strategis dan rencana operasional.

Beberapa keuntungan yang dapat diambil oleh FE UPMI dengan adanya rencana strategis, yaitu: pertama, rencana strategis dapat memajukan pemikiran dan tindakan strategis. Hal

tersebut pada gilirannya akan mengarah pada pengumpulan informasi yang lebih sistematis, meningkatnya perhatian terhadap pembelajaran fakultas, mengklasifikasikan arah fakultas ke depan, dan memantapkan prioritas tindakan fakultas. Kedua, rencana strategis dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan. Rencana strategis memfokuskan perhatian pada isu-isu dan tantangan penting yang dihadapi oleh fakultas. Rencana strategis dapat membantu fakultas merumuskan dan mengkomunikasikan secara jelas maksud-maksud strategisnya. Ketiga, rencana strategis dapat memicu tanggapan fakultas yang semakin tinggi dan kinerja yang semakin baik. Fakultas Ekonomi UPMI didorong untuk mengklarifikasi dan mengenali isuisu strategis, memberikan respon secara cepat terhadap tuntutan dan tekanan internal dan eksternal, serta mampu mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat secara efektif. Keempat, rencana strategis dapat memberi keuntungan langsung pada orangorang di dalam fakultas. Pembuat kebijakan dan pembuat keputusan dapat memposisikan peran dan tanggung jawabnya secara lebih baik. *Team work* dan keahlian juga semakin diperkuat diantara anggota fakultas. Dengan kata lain tujuan utama sasarandari rencana strategis ini adalah agar fakultas dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal sehingga fakultas mampu mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal secara cepat dan efektif.

Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ini merupakan rencana pengembangan FE UPMI untuk periode 2020-20240. Rencana strategis ini disusun berlandaskan visi fakultas. Visi Fakultas merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi, dan berbagai kecenderungan (perubahan lingkungan) yang sedang dan akan berlangsung.Fakultas selaku institusi pendidikan tinggi mengembangkan diri dengan mekanisme perencanaan jangka panjang, yang seringkali dinyatakan dalambentuk Master Plan (Rencana Induk Pengembangan). Untuk mengelola pengembangan FE UPMI dirasakan perlu adanya perencanaan strategis dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, laju perubahan cepat, tuntutan masyarakat yang lebih maju, kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuandanteknologi, serta globalisasi pada umumnya. Perencanaan strategis pada hakekatnya adalah suatu kerangka kerja yang berorientasi pada penanggulangan isu, sehingga rencana kerja disusun berdasarkan isu pokok. Isu tersebut dijabarkan dari kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal mengindikasikan adanya kemungkinan kekuatan dan kelemahan, sedangkan kondisi eksternal mengindikasikan kemungkinan peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

Rencana Induk Pengembangan (RENIP) FE UPMI merupakan perencanaanjangka panjang, yang berorientasi ke depan, menetapkan tujuan dan penyusunan strategi secara eksplisit. Memetakan alur kegiatan saat ini dengan gambaran masa depan yang diinginkan berdasarkan pada pertimbangan matang akan kemampuan organisasi dan kecenderungan perubahan lingkungan.

2.2 Nilai dasar

Bahwa sesungguhnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

FE UPMI dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesi, akademik dan vokasi, serta wajib berperan dalam penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai perguruan tinggi berdasarkan nilai-nilai pancasila perlu menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian dan moralitas religious baik dalam konteks kehidupan individual maupun sosial sehingga proses

pembelajaran yang dilakukan menekankan bentuk-bentuk pembelajaran yang berorientasi pada learning to know,

learning to do, learning to be, dan learning to live together**.** Dihasilkannya lulusan yang bersifat jujur, adil, cerdas, terpercaya, Cerdas yang meliputi cerdas spritual yakni beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. Untuk mampu mencapai visi dan misi serta tujuan dari FE UPMI yang menghasilkan lulusan yang berkompeten dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dalam intelektualitas, teknologi juga ilmu pengetahuan diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaan tersebut. Maka FE UPMI menerapkan prinsip-prinsip akhlakul karimah yang harus diimplementasikan seluruh sivitas akademika.

Dengan berprinsip bahwa "exelent University" di harapkan semua civitas akademika baik mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan yang berkompeten dan mampu bersaing dengan tetap mengutamakan akhlak yang menjadi budaya leluhur kita sebagai orang timur. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program, serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan FE UPMI, untuk itu menghasilkan lulusan yang kompeten, professional dan berdaya saing sehingga disusunlah Rencana Induk Pengembangan FE UPMI.

2.3 Visi Misi dan Tujuan FE UPMI

2.3.1 Visi

Menjadi Fakultas Ekonomi unggul di bidang pendidikan, teknologi, dan budaya menuju universitas teknopreneur ditingkat Internasional tahun 2040.

2.3.2 Misi

Misi Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

- Menyelenggarakan pendidikan dibidang Ekonomi yang berkualitas berstandar internasional;
- Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada bidang Ekonomi dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional;
- Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan Ekoniomi berdasarkan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional;
- Melakukan peran pengembangan pemberdayaan dibidang ekonomi menuju masyarakat yang sejahtera serta berwawasan pengetahuan;

- Mengembangkan kegiatan Ekonomi yang dinamik berkelanjutan dalam perbaikan kelembagaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat.

2.3.3 Tujuan

Tujuan Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

- Teselenggaranya Program Pendidikan Sarjana Ekonomi yang berkualitas berstandar Internasional;
- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sarjana Ekonomi dalam menghadapi tantangan di dunia kerja;
- Mendorong Sarjana Ekonomi dalam kegiatan penelitian yang berkualitas tinggi untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat;
- Meningkatkan kerjasama dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berwawasan pengetahuan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas dan efektivitas kelembagaan melalui penerapan ilmu pengetahuan terbaru.

2.4. Fungsi dan Tujuan Nilai dasar

Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yaitu UU No.12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang diundangkan pada Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Pasal 4 UU Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Pendidikan Tinggi berfungsi :

1). Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

2). Mengembangkan sifitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, daya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma.

3). Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menetapkan nilai humaniora.

Sedangkan tujuan pendidikan tinggi sebagaimana yang di tetapkan pada pasal 5 UU Pendidikan Tinggi adalah :

1). Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, trampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa

2). Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

3). Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.

4). Terwujudnya pengabdian kepada masyarakt berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB 3 ANALISIS LINGKUNGAN

3.1 Analisis Lingkungan Eksternal

3.1.1 Faktor Ekonomi

Efek dari kondisi perekonomian di Indonesia dapat berdampak pada pola pikir masyarakat yang ingin mendaftarkan putra putrinya di FE UPMI. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sedangkan harga kebutuhan pokok melonjak naik dan tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat.

3.1.2 Faktor Sosial

Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Medan sebanyak 164 Sekolah yang terdiri dari 21 SMA Negeri dan 143 SMA Swasta. Sementara jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di wilayah Kabupaten Jember sebanyak 177 SMK yang terbagi dalam 9 SMK Negeri dan 168 SMK Swasta. Data yang disampaikan tersebut belum termasuk jumlah SMA/MA dan SMK yang berada diwilayah karesidenan Besuki Raya dan Regional Sumatera Utara. Dengan banyaknya jumlah sekolah ditingkat Menengah Atas dan Kejuruan di wilayah Kota Medan, dapat dijadikan peluang bagi FE UPMI untuk menampung dan menyerap calon mahasiswa yang akan dijadikan sebagai anak didik di FE UPMI.

3.1.3 Faktor Lingkungan

Persaingan yang ketat antara Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang ada diwilayah Kota Medan mengharuskan UPMI untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pendidikan agar tetap bisa bersaing dengan perguruan tingggi lainnya.

Sebagai Fakultas di bidang ilmu Ekonomi yang baru dikenal oleh masyarakat dengan mengingat bahwa FE UPMI merupakan lembaga pendidikan dibidang Tridarma PT, maka Fakultas Ekonomi UPMI harus bekerja lebih keras dalam mempromosikan program studi baru yang masih belum dimiliki oleh Perguruan Tinggi lain, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk menarik minat calon mahasiswa agar bisa bergabung pada Program Studi S1 Manajemen. Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 31 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Dari banyaknya perguruan tinggi yang ada di Medan, maka Medan merupakan kota pendidikan yang mampu menghasilkan banyak tenaga kerja berkualitas.

3.1.4 Faktor Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi. Perkembangan ilmu teknologi terjadi pada sebagian besar lini kebutuhan dasar manusia. Dengan semakin berkembangnya ilmu teknologi, maka kemampuan Sumber Daya Manusia lebih diperlukan dengan berbagai macam keahlian bidang ilmu masing-masing. Pengembangan teknologi ini harus diikuti dalam pengembangan aktivitas akademika, mulai dari penelitian, pengabdian masyarakat dan Pendidikan, serta layanan administrasi yang berprinsip good governance dengan pemanfaatan teknologi.

3.1.5 Peluang (Opportunity)

1) Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti terkait program MBKM.
2) Lulusan SMA/SMK di wilayah Kabupaten Jember cukup banyak, sehingga menjadi peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau Fakultas Ekonomi

3) Program studi Kewirausahaan dan Bisnis Digital merupakan prodi baru yang diunggulkan pemerintah untuk memberi peluang sebagai wirausaha bagi lulusan
4) Kota Medan sebagai salah satu kota pendidikan di Sumatera Utara, sehingga menjadi peluang sebagai tempat pendidikan
5) Meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap output dalam tridharma sebagai dampak dari revolusi industri 4.0
6) Tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan lulusan FE UPMI
7) Keunggulan yang dimiliki oleh Program Studi S1 Manajemen menjadi ciri khas lulusan FE UPMI
8) Kebijakan nasional yang semakin favorable dalam peningkatan kualitas perguruan tinggi, sehingga memungkinkan FE UPMI untuk memperkuat resources availability terutama dari sisi finansial.

3.1.6 Ancaman (Threat)

1) Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat
2) Persaingan antar perguruan tinggi yang berada di Kota Medan dan memiliki fakultas non Ekonomi
3) Program pemerintah (Kartu Indonesia Pintar) masih bagi perguruan tinggi terakreditasi Baik
4) Lingkungan pendidikan tinggi pada area fakultas ekonomi dan bisnis di dalam negeri semakin kompetitif seiring dengan orientasi world-class university yang diterapkan dalam target perguruan tinggi
5) Semakin menurunnya minat mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena menurunnya kesejahteraan ekonomi akibat Pandemi Covid-19

3.2 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal memuat informasi tentang kondisi FE UPMI yang meliputi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh unit kerja/institusi sebagai pedoman dalam pembuatan program kerja masing-masing unit sesuai dengan kekuatan, kebutuhan, dan peluang yang ada. Fakultas Ekonomi mengikuti

analisis pada UPMI. Kajian analisis dilakukan dengan mengikuti score utama akreditasi 9 kriteria.



Gambar 1. Milestone Pencapaian Visi Misi

3.2.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Statuta UPMI merupakan dasar pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Keberhasilan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi didukung oleh struktur organisasi yang disertai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh unit kerja. Kerja sama Universitas dr. Soebandi juga terjalin dengan institusi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma.

Struktur organisasi Fakultas Ekonomi UPMI terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas, Kaprodi S1 Manajemen. Rektor UPMI mendelegasikan penyelenggaraan tri dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi UPMI beserta kegiatan penunjangnya kepada Dekan. Senat Akademik Fakultas membantu Lembaga UPMI sebagai Badan Penyelenggara dalam proses pemilihan Dekan dengan memperhatikan aspirasi dari warga fakultas.

Fakultas Ekonomi UPMI juga memiliki beberapa lembaga pendukung untuk terlaksananya kegiatan tri dharma Perguruan Tinggi, yaitu Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang merupakan unit penunjang fakultas bertanggung jawab kepada Dekan dalam hal pengendalian standar dan penjaminan mutu fakultas. Sedangkan di tingkat Program studi didukung oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) yang berfungsi meningkatkan mutu akademik secara bertahap melalui pengembangan sistem penjaminan mutu dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen

sehingga tercapai mutu akademik yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Tri dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan kelembagaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dilaksanakan dengan menganut prinsipprinsip tata kelola fakultas yang baik / Good Faculty Governance (GFG), yaitu meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibiltas, independensi, dan keadilan (Fairness). Prinsip-prinsip Tata kelola Fakultas yang baik disosialisasikan, diimplementasikan, dilakukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan secara terukur dari waktu ke waktu melalui suatu sistem perangkat dan kelembagaan yang dibentuk oleh dan diatur dalam suatu Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi UPMI.

3.2.3 Mahasiswa

Mahasiswa Fakultas Ekonomi UPMI adalah peserta didik pada program pendidikan tinggi yang terdaftar di universitas dan dicatatkan pada Sistem Informasi Pendidikan Tinggi Nasional. Universitas dr. Soebandi mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dimana dari tahun-ketahun diharapkan terjadi peningkatan animo, disertai sebaran asal mahasiswa.

Fakultas Ekonomi UPMI juga melakukan promosi ke beberapa sekolah bersamaan dengan promosi universitas. Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan animo masyarakat tentang keberadaan Fakultas Ekonomi UPMI. Untuk meningkatkan keberagaman mahasiswa, warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UPMI. Mahasiswa UPMI khususnya mahasiswa FE berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan yang dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. Fakultas Ekonomi UPMI mengupayakan kesejahteraan mahasiswa dalam berbagai bentuk kegiatan kemahasiswaan, fasilitas umum, serta beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.

3.2.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah dan mutu mahasiswa diimbangi dengan ketersediaan dan peningkatan mutu dosen agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Ditinjau dari rasio dosen dengan mahasiswa sesuai BAN-PT Nomor

1041/BANPT/LL/2020 tentang rasio mahasiswa per jenjang di Pendidikan Tinggi untuk dibidang sosial adalah 1 : 45, jumlah dosen yang ada di Fakultas Ekonomi UPMI sejumlah minimal persyaratan pada saat pengajuan pembukaan fakultas.

Dengan jumlah Sumber daya manusia yang ada di Fakultas Ekonomi diupayakan dapat menjalankan tugas utamanya yaitu tri dharma dengan baik. Beban sks dalam BKD setiap dosen rata-rata 12-16 sks. Dosen dapat melakukan penelitian minimal 1 kali/ tahun dan dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali/ semester. Kualitas dosen juga cukup baik dimana sebagian dosen telah mengikuti kegiatan PEKERTI. Hal ini menunjukkan bahwa FE berupaya untuk terus menjadi sebuah lembaga yang berkualitas tinggi dan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusianya.

3.2.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Sumber pembiayaan Fakultas Ekonomi UPMI masih diperoleh dari peserta didik, yayasan, sumber pemerintah, hibah, unit usaha, masyarakat atau pihak luar negeri. Pengelolaan kekayaan dan pendanaan UPMI dilaksanakan secara mandiri dan terpadu oleh Dekan FE UPMI dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam suatu sistem, tata kelola dan prosedur pengelolaan yang mengacu pada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan dan pendanaan UPMI dengan persetujuan dari yayasan.

Usulan penggunaan dana Fakultas Ekonomi UPMI tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diajukan oleh Dekan FE kepada Rektor UPMI. Kemudian Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan akan diajukan oleh Rektor kepada Ketua Yayasan UPMI-S. Sampai tahun 2020 ini, UPMI memperoleh sejumlah dana dengan persentase masih >75% (96%) diperoleh dari peserta didik (mahasiswa) terhadap total perolehan dana. Oleh karena itu, perlu upaya yang besar untuk mendapatkan dana dari sumber lain selain peserta didik baik dari sisi kualitas maupun kuantitas untuk menambah pendanaan institusi. Sejumlah lembaga donor dari luar negeri juga perlu dijajaki untuk mengembangkan kerjasama universitas.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi UPMI dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan pelaksanaan tri dharma, kegiatan penunjang akademik, dan satuan layanan publik yang relevan untuk mencapai tujuan FE UPMI Kecukupan sarana dan prasarana saat ini masih

memadai untuk menunjang kegiatan tri dharma, walaupun belum ada fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus. Ketersediaan kelas, laboratorium komputer dan laboratorium lapangan, laboratorium pemasaran secara umum memadai khususnya yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Sistem Informasi dan Teknologi dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis di bidang pengolahan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Sistem informasi yang ada saat ini sudah meliputi layanan administrasi yang cukup efektif melayani akademik, keuangan, SDM, dan sarana serta prasarana. Sistem informasi mudah diakses lengkap dan terintegrasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan administrasi, walaupun tidak semua civitas akademika mampu dengan baik menggunakan sistem tersebut.

3.2.6 Pendidikan

Pendidikan di Fakultas Ekonomi UPMI diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan visi-misi-tujuan universitas, visi-misi fakultas penyelenggara, tujuan pendidikan, tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, kebutuhan industri dan masyarakat, profil dan kompetensi lulusan, tantangan lokal dan nasional, dan serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pendidikan UPMI mendukung dan berupaya menyesuaikan kurikulum dengan kebijakan baru di melalui program "Merdeka Belajar– Kampus Merdeka (MBKM)", yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21 ini.

Penyempurnaan kurikulum FE UPMI dilaksanakan oleh program studi (atas masukan dari stakeholders) dengan supervisi dari LP3M dan dilakukan pendokumentasian sesuai pedoman pelaksanaan kurikulum. Pembelajaran sudah melakukan blended learning dengan system e-learning dan praktikum di laboratorium maupun di lahan praktik. Interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa harus ditingkatkan baik didalam kegiatan akademik maupun non

akademik, sehingga nantinya dapat memperoleh award yang bertaraf nasional bahkan internasional dan mencetak lulusan yang kreatif, inovatif serta kompetitif di dunia kerja.

Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen dapat terintegrasi dalam pembelajaran dengan menjadi referensi ajar atau bagian dari bahan kajian dalam mata kuliah. FE UPMI terus berupaya meningkatkan suasana akademik yang kondusif dengan senantiasa mengevaluasi tingkat kepuasan sivitas akademik setiap tahun atau setiap semesternya.

3.2.7 Penelitian

Penelitian di FE UPMI dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin yang dikembangkan baik secara mandiri oleh FE UPMI maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian dilakukan oleh sivitas akademika yang melibatkan dosen, mahasiswa dan kerja sama dengan stakeholders yang dilaksanakan berdasarkan kompetensi. Lembaga yang mengelola penelitian adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang menyediakan dokumen renstra penelitian, pedoman penelitian, dan dokumen pelaporan penelitian.

3.2.8 Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu implementasi misi fakultas dalam bentuk layanan dan/atau kerja sama dengan masyarakat, sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki melalui Pusat Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat, Pusat Penelitian, Program Studi, Laboratorium, Kelompok, dan Perorangan. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh sivitas akademika yang melibatkan dosen, mahasiswa dan kerja sama dengan stakeholders yang dilaksanakan berdasarkan kompetensi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang menyediakan dokumen renstra pengabdian masyarakat, pedoman pengabdian masyarakat, dan dokumen pelaporan pengabdian masyarakat. FE UPMI membentuk kelompok pelaksana pengabdian kepada

masyarakat yang dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan dibidang ekonomi dan bisnis di masyarakat.

3.2.9 Luaran dan Capaian Tridharma

Sistem penilaian hasil belajar mahasiswa terus-menerus disempurnakan agar menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Hal ini diindikasikan dengan ketentuan IPK lulusan harus ≥ 3,00 dengan lama studi rata-rata program sarjana 4 tahun dan lama penyusunan skripsi atau jurnal ilmiah terpublikasi Sinta 1 atau Sinta 2 atau menghasilkan produk dalam waktu 6 bulan. Soft skill lulusan juga diperkaya dengan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta kewirausahaan baik yang dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Daya saing lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr. Soebandi untuk memasuki dunia kerja harus cukup baik, dengan masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya selama 10 bulan.

Capaian tri dharma dapat menghasilkan HKI dalam pendidikan berupa buku ataupun modul ber-ISBN, dalam penelitian dan pengabdian masyarakat berupa artikel publikasi maupun produk yang bersaing di tingkat nasional maupun internasional serta kebermanfaatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Fokus luaran yang dilakukan oleh FE UPMI yang disusun berdasarkan indikator pada kriteria akreditasi dan IKU dan IKT dari SN DIKTI.

BAB 4
ANALISIS PENETAPAN ARAH PENGEMBANGAN, STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA INDUK

	Strength	Weakness
SWOT dan Strategi **C1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi**	**1.** Memiliki rencana jangka menengah (Renstra) **2.** Memiliki rencana jangka pendek (Renop) **3.** Memiliki indikator kinerja **4.** Memiliki target capaian **5.** Memiliki visi misi yang berorientasi nasional dan internasional	**1.** Belum adanya instrumen pengukuran ketercapaian indikator kinerja **2.** Belum adanya evaluasi pencapaian indikator yang dilakukan secara berkelanjutan **3.** Belum ada tindak lanjut dari evaluasi yang telah dilakukan

Penguatan pelayanan pendidikan oleh Perguruan Tinggi (PT) UPMI menjadi fokus pembangunan pendidikan pada periode tahun 2020-2040, tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dari UPMI yang selanjutnya di integrasikan pada RIP di FE UPMI. Untuk memantapkan ketercapaian dimensi dan sasaran strategis RIP, peta arah pengembangan atau roadmap FE UPMI perlu ditetapkan dengan memperhatikan analisis SWOT yang dimiliki FE UPMI. RIP FE UPMI ini terdiri atas komponen faktor pendukung, indikator kinerja, bidang fokus, prioritas pengembangan, dan arah kebijakan, yang semuanya ditujukan untuk mencapai visi dan misi yaitu menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang unggul, berdaya guna dalam meningkatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni dibidang Ekonomi dan Manajemen. Dengan merujuk pada fokus Rencana Induk Pengembangan tersebut, menetapkan arah pengembangan selama 25 tahun ke depan. Berdasarkan analisis kondisi lingkungan eksternal di masa mendatang serta lingkungan internal FE UPMI, arah pengembangan yang akan ditetapkan terdiri atas :

4.1 Matrik Analisis SWOT.

4.1.1 Bidang Analisi SWOT Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Opportunity	Strategi SO	Strategi WO
1. Komitmen untuk melakukan perubahan perbaikan sangat baik 2. Adanya perbaikan sistem yang terintegrasi dengan sistem IT 3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki visi penciri	1. Meningkatkan kejelasan,kerealistikan, dan ketertarikan antara visi,misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2. Meningkatkan pemahaman, komitmen, dan konsistensi pengembangan FE UPMI untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka perwujudan visi dan penyelenggaraaan misi 3. Meningkatkan kemampuan mengadopsi visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai pedoman pengembangan unit-unit di dalam lingkungan FE UPMI 4. Mengaplikasikan visi penciri dalam setiap kegiatan	1. Membuat instrumen pengukuran ketercapaian indikator kinerja 2. Melaksanakan evaluasi pencapaian indikator yang dilakukan secara berkelanjutan 3. Melaksanakan tindak lanjut dari evaluasi yang telah dilakukan
Threat	**Strategi ST**	**Strategi WT**

1. Kebijakan/ regulasi yang berubahubah 2. Adanya PTN yang menjadi pesaing	1. Melakukan monitoring evaluasi pencapaian visi misi FE UPMI 2. Melakukan penyusunan visi misi, Renstra, dan Renop yang fleksibel berdasarkan kebutuhan 3. Melakukan pengembangan FE UPMI untuk meningkatkan kualitas dan daya saing	1. Meningkatkan komitmen dalam pengembangan FE UPMI untuk mencapai kinerja dan mutu

4.1.2 Bidang Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

SWOT dan Strategi	Strength	Weakness

C2 Tata Pamong Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu	1. Tersedianya dokumen formal sistem tata pamong yang sesuai dengan konteks institusi 2. Tersedianya bukti yang sahih terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi 3. Tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya 4. Tersedianya bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan Good Faculty Governance 5. Adanya pedoman penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas 6. Memiliki mekanisme pengambilan kebijakan yang melibatkan anggota dan pimpinan 7. Memiliki jaringan kerja sama dalam negeri baik dengan lembaga pendidikan, institusi pemerintahan, maupun industri 8. Tersedianya bukti formal keberfungsian sistem dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien. 9. Tersedianya pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek pendidikan, pengembangan, suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama. 10. Telah berjalannya lembaga SPMI sudah memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga BAN-PT dan LAM	1. Belum adanya lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas 2. Belum optimalnya pengembangan program kerja sama dengan instansi luar negeri 3. Belum memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional 4. Belum tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan luar negeri, dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.

	11. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan dalam negeri, dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	
Opportunity	**Strategi SO**	**Strategi WO**
1. Meningkatnya tawaran kerja sama dari pihak eksternal baik lembaga pendidikan maupun industri serta perguruan tinggi lain 2. Berkembangnya berbagai teknologi komunikasi memungkinkan efisiensi sistem kepemimpinan dan manajemen	1. Meningkatkan dan mengembangkan kelengkapan struktur dan organ perguruan tinggi untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip tata pamong yang lebih baik dan efektif	1. Meningkatkan kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumberdaya dan program perguruan tinggi, termasuk sistem komunikasi dan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tata pamong dan tata kelola fakultas.
Threat	**Strategi ST**	**Strategi WT**
1. Banyaknya Perguruan Tinggi pesaing yang sama-sama sudah menerapkan standar kompetensi yang bertaraf nasional maupun internasional 2. Berkembangnya berbagai versi penilaian terhadap kualitas pengelolaan institusi pendidikan tinggi yang dapat mempengaruhi citra lembaga di masyarakat 3. Adanya perbedaan standar mutu di antara perguruan tinggi 4. Situasi persaingan global dalam bidang pendidikan	1. Meningkatkan kelengkapan dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal serta konsistensi dan keefektifan implementasinya	1. Mengembangkan dan meningkatkan keberadaan kebijakan dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik pada perguruan tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional, serta keefektifannya untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

4.1.3 Bidang Mahasiswa

	Strength	Weakness
SWOT dan Strategi **C3. Kemahasiswaan**	1. Memiliki pedoman penerimaan mahasiswa baru dan kebijakan pedoman tentang layanan kemahasiswaan 2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama ≥ 95% 3. Tersedia layanan kemahasiswaan dan sistem yang menjamin mutu kemahasiswaan	1. Masih belum dilakukan sosialisasi terkait pedoman tentang kemahasiswaan dan PMB 2. Jumlah mahasiswa asing belum ada 3. Pelaksanaan penjaminan mutu masih belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut tentang layanan kemahasiswaan 4. Belum seluruhnya layanan kemahasiswaan dapat diimplementasikan 5. Terdapat survey kepuasan terhadap mahasiswa untuk menjamin mutu layanan kemahasiswaan: pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan, penyuluhan karir, dan bimbingan kewirausahaan namun belum mencakup semua layanan kemahasiswaan 6. Mahasiswa yang mengikuti UKM masih sedikit
Opportunity	**Strategi SO**	**Strategi WO**

1. Sebaran mahasiswa FE UPMI juga berasal dari luar propinsi Sumatera Utara 2. Potensi mahasiswa yang memiliki kreativitas dan prestasi mulai meningkat	1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pedoman kemahasiswaan melalui website, promosi PMB secara kontinue 2. Adanya kebijakan, program, keterlibatan, dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat	1. Kebijakan yang disusun sudah memuat sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan di tingkat perguruan tinggi yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien 2. Membuat kebijakan menjaring mahasiswa

		dengan menambahkan kualifikasi yang menjadikan prioritas dengan syarat ditunjang oleh adanya prestasi 3. Melakukan sosialisasi secara aktif ke SMA/SMK yang ada di wilayah Sumatera Utara.
Threat	**Strategi ST**	**Strategi WT**
1. Layanan kemahasiswaan masih berbasis off-line 2. Di wilayah Kabupaten Jember terdapat beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menjadi pesaing bagi Universitas dr. Soebandi	1. Membuat kebijakan dan penyelenggaraan sistem layanan berbasis online 2. Fakultas Ekonomi harus selalu meningkatkan mutu dan layanan kemahasiswaan agar mampu bersaing dan menjadi perguruan tinggi pilihan bagi calon mahasiswa.	1. Membuat kebijakan dan penyelenggaraan sistem layanan bagi mahasiswa memuat pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan, penyuluhan karir, dan bimbingan kewirausahaan

4.1.4 Bidang Sumber Daya Manusia

SWOT dan Strategi C4. Sumber Daya Manusia	Strength	Weakness
	1. Rasio jumlah dosen FE UPMI terhadap jumlah program studi 1:4 2. Jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat sudah mengajukan dengan rata-rata 1 dosen 1 penelitian tiap tahun 3. Memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kriteria cukup baik sesuai kualifikasi jenis pekerjaannya (Manajemen, Pustakawan, lT, dll) 4. Seluruh dosen pengajar minimal berpendidikan S2 dengan bidang keahlian yang sesuai dengan pengajarannya	1. Fakultas masih belum memiliki dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar 2. Rasio jumlah mahasiswa terhadap seluruh dosen masih belum ideal 3. Masih terbatasnya jumlah dosen yang berprestasi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional 4. Masih terbatasnya kompetensi tenaga kependidikan terutama dibidang teknologi informasi
Opportunity	**Strategi SO**	**Strategi WO**

1. Banyaknya tawaran beasiswa studi lanjut untuk meningkatkan pendidikan dan jabatan fungsional dari berbagai lembaga 2. Banyak kesempatan untuk mengikuti kegiatan ilmiah secara nasional maupun internasional untuk meningkatkan prestasi dosen 3. Banyak lembaga yang dapat diajak kerja sama untuk melakukan pelatihan dalam pengembangan SDM baik untuk dosen maupun tenaga kependidikan 4. Terdapat berbagai aplikasi teknologi informasi yang dapat digunakan	1. Memanfaatkan jejaring penelitian dan pengabdian masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah, dsb 2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dosen dengan studi lanjut dan ikut serta dalam kegiatan ilmiah secara nasional dan internasional	Mengefektifkan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, dan sanksi pada ketersediaan sumberdaya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi

Threat	Strategi ST	Strategi WT
1. Diberlakukannya kewajiban dosen untuk memiliki jabatan fungsional dan yang dinilai kualitasnya pada FE UPMI adalah adanya guru besar **2.** Berkembangnya teknologi informasi yang pesat sehingga dibutuhkan kompetensi SDM yang mumpuni dalam perkembangan teknologi	Menyusun kebijakan dan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan FE UPMI serta konsistensi pelaksanaannya	Mengadakan survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen dan kompetensi SDM

4.1.5 Bidang Keuangan, Sarana, dan Prasarana

	Strength	Weakness
SWOT dan Strategi **C5. Keuangan, Sarana dan Prasarana**	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki FE UPMI terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM. 2. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen FE UPMI). 3. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.) 4. Dilakukannya audit keuangan setiap tahun oleh pihak eksternal KAP 5. Adanya sistem audit internal bermanfaat untuk membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh SPI 6. Kebijakan keuangan bersifat one police system yaitu pengelolaan keuangan dengan satu pintu sehingga memudahkan untuk monitoring	1. Besarnya persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana FE UPMI sebagian besar masih berasal dari mahasiswa 2. Besarnya persentase perolehan dana FE UPMI yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan FE UPMI 3. Besaran rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/ tahun belum mencapai 20 juta per tahun per mahasiswa 4. Besaran Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun masih belum mencapai 10 juta per tahun per dosen 5. Besaran rata-rata dana PkM dosen per tahun belum mencapai 5 juta per tahun 6. Besaran Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana FE UPMI masih dibawah 1%. 7. Besaran Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana FE UPMI masih di bawah 1% 8. Kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki FE UPMI belum memfasilitasi yang berkebutuhan khusus
Opportunity	**Strategi SO**	**Strategi WO**

1. Karena biaya kuliah untuk mahasiswa yang masih terjangkau kemampuan untuk bersaing dalam merekrut	1. Meningkatkan keberadaan kebijakan dan sistem penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penyelenggaraan FE UPMI serta	1. Meningkatkan keberadaan kebijakan dan sistem pembiayaan penyelenggaraan FE UPMI serta konsistensi pelaksanaanya
mahasiswa berpeluang besar 2. Kemungkinan adanya penggalangan sumber penerimaan lain di luar SPP mahasiswa berupa kerjasama dengan instansi lain 3. Kemungkinan diperolehkannya dana penelitian dan pengabdian melalui hibah dari DIKTI 4. Kemungkinan diperoleh sumber - sumber dana untuk program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama dengan pemerintah maupun swasta 5. Masih tingginya kebutuhan tenaga professional di lahan	konsistensi pelaksanaanya 2. Meningkatkan kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	2. Meningkatkan kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
Threat	**Strategi ST**	**Strategi WT**

1. Sistem penggajian yang menuntut penyesuaian menjadi bagian tuntutan yang harus dipenuhi dan membutuhkan peningkatan anggaran serta dapat menghambat layanan yang berkualitas 2. Masih terbatasnya SDM khususnya tenaga pemanfaatan Perkembangan teknologi informasi yang cepat 3. Keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana serta media pendidikan yang berbasis teknologi akan menjadi kendala bagi pengembangan potensi mahasiswa dan persaingan antar perguruan tinggi	1. Peningkatan kemampuan SDM khususnya tenaga teknis dalam pemanfaatan perkembangan teknologi informasi yang cepat 2. Peningkatan penerimaan sumber dana dari luar mahasiswa seperti hibah 3. Peningkatan dalam memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana serta media pendidikan yang berbasis teknologi akan menjadi kendala bagi pengembangan potensi mahasiswa dan persaingan antar institusi.	1. Peningkatan sumber dana dari luar mahasiswa seperti hibah, pendirian badan usaha komersial 2. Komersialisasi fasilitas yang tersedia seperti sewa gedung, laboratorium 3. Peningkatan kemampuan SDM melalui kegiatan TOT, Workshop dan Pelatihan. 4. Penambahan sarana dan prasarana yang memfasilitasi yang berkebutuhan khusus

4.1.6. Bidang Pendidikan

SWOT dan Strategi	Strength	Weakness

C6. Pendidikan	1. Tersedianya panduan pengembangan kurikulum 2. Tersedianya panduan layanan mahasiswa dan alumni 3. Panduan pengembangan kurikulum yang peka terhadap isu terkini (Pendidikan karakter, SDG's, NAPZA dan Pendidikan antikorupsi) 4. Tersedianya pedoman pelaksanaan kurikulum untuk mengakomodir umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhiran 5. Tersedianya pedoman penerapan sistem penugasan dosen 6. Telah dilaksanakannya sistem monev pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran 7. Tersedianya pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran 8. Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik) 9. Sivitas akademika yang telah menyadari pentingnya keterlibatan semua komponen dalam pelaksanaan Pendidikan, PkM dan penelitian 10. Animo sivitas akademika yang besar dalam terlibat pada kegiatan non akademik 11. Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan non akademik 12. Tersedianya pengelolaan proses pembelajaran yang berbasis IT	1. Belum optimalnya pelakasanaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan visi dan misi 2. Belum tersedianya panduan pengembangan kurikulum yang mengacu pada OBE dan mengakomodir MBKM 3. Belum tersedianya panduan pengembangan kurikulum institusi yang mengacu dengan benchmark pada instiusi internasional 4. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang belum melibatkan unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan 5. Belum adanya sosialisasi/kordinasi kerja terkait pedoman pengembangan kurikulum dan pedoman pelaksanaan kurikulum 6. Belum adanya pedoman sahih terkait penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran 7. Belum terlaksananya sosialisasi pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran 8. Belum terlaksananya survey berkala terkait kepuasan stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif 9. Belum adanya feed back yang terstruktur dari hasil monev terkait kepuasan

		tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif untuk ditindak lanjuti dalam renstra pengembangan suasana akademik 10. Belum optimalnya penggunaan fasilitas IT dalam memfasilitasi kegiatan akademik sesuai kebutuhan pengguna (stakeholders internal, dosen, dan mahasiswa),dikarenakan fitur yang masih terbatas
Opportunity	**Strategi SO**	**Strategi WO**
1. Sivitas akademika memiliki kemampuan dan potensi untuk mengembangkan keilmuan di lingkungan eksternal FE UPMI 2. Adanya alokasi dana pengembangan keilmuan bagi sivitas akademika di lingkungan internal maupun eksternal FE UPMI 3. PT yang mulai membangun jejaring kerjasama dalam pengembangan kurikulum dengan institusi eksternal 4. Yayasan UPMI-S yang mendukung proses pelayanan akademik berbasis IT	1. Meningkatkan implementasi keberadaan kebijakan dan dukungan FE UPMI dalam proses pembelajaran 2. Meningkatkan implementasi keberadaan kebijakan dan dukungan perguruan tinggi dalam proses sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka perwujudan visi dan misi penyelenggaraan FE UPMI 3. Meningkatkan implementasi keberadaan kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan dan konsistensi pelaksanaannya.	1. Meningkatkan implementasi keberadaan kebijakan dan dukungan FE UPMI dalam pengembangan kurikulum 2. Meningkatkan implementasi keberadaan kebijakan dan dukungan FE UPMI dalam pengembangan sistem penilaian 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran berkala untuk mencapai standar pembelajaran.
Threat	**Strategi ST**	**Strategi WT**

1. Perubahan kebijakan terkait pengembangan komponen pendidikan pada PT oleh pemerintah pusat sehingga menuntut PT beradaptasi dengan cepat dalam membuat kebijakan **2.** Kurangnya penyerapan SDM dosen	1. Mengadakan monev berkala terkait dengan pelaksanaan kurikulum yang disertai dengan Rencana tindak lanjut yang terstruktur 2. Melakukan pemetaan SDM FE UPMI sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan berdasarkan keilmuan.	1. Meningkatan kualitas kurikulum Program studi di lingkungan FE UPMI serta proses belajar mengajar (PBM) yang peka terhadap peraturan terbaru 2. Menyusun panduan pengembangan kurikulum yang mengacu pada OBE dan mengakomodir MBKM
sesuai dengan kebutuhan karena keterbatasan SDM yang berkualifikasi yang dibutuhkan		

4.1.6 Bidang Penelitian

	Strength	Weakness
SWOT dan Strategi **C7. Penelitian**	1. Sudah tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja 2. Sudah tersedianya buku panduan penelitian dan bukti sosialisasinya 3. Adanya pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: a. Tata cara penilaian dan review, b. legalitas pengangkatan reviewer, c. hasil penilaian usul penelitian, d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f. dokumentasi output penelitian. 4. Terbentuknya kelompok riset di tingkat prodi	Kurang maksimalnya dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek- aspek berikut: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu
Opportunity	**Strategi SO**	**Strategi WO**

1. Dosen memiliki kemampuan dan potensi untuk melakukan penelitian dengan target luaran publikasi **2.** Adanya alokasi dana penelitian internal **3.** PT melalui LPPM mulai melakukan pelatihan untuk pengembangan SDM dosen di bidang penelitian	Membuat kebijakan dan arah pengembangan penelitian tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan penelitian di unit kerja	Membuat keunggulan, kesesuaian arah dan program penelitian sesuai dengan visi FE UPMI.

Threat	Strategi ST	Strategi WT
1. Perubahan kebijakan terkait penelitian secara nasional **2.** Ketatnya persaingan untuk memperoleh pendanaan eksternal dari DRPM Kemendikbud	Membentuk kelompok riset dan memanfaatkan keberadaan dan keberfungsian laboratorium riset	Menentukan kebijakan dan arah pengembangan penelitian FE UPMI serta dukungan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan penelitian di program studi

4.1.7 Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

	Strength	Weakness
SWOT dan Strategi **C8. Pengabdian Masyarakat**	**1.** Dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja sudah tersedia. **2.** Pedoman PkM dan bukti sosialisasinya sudah tersedia. **3.** Pelaksanaan proses PkM sudah mencakup 6 aspek sebagai berikut: a. Tatacara penilaian dan review, b. Legalitas pengangkatan reviewer, c. Hasil penilaian usul PkM, d. Legalitas penugasan pelaksana PkM/ kerjasama PkM e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f. Dokumentasi output PkM. **4.** Kelompok pelaksana PkM sudah tersedia.	1. Kurang maksimalnya dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut : a. Komprehensif, b. Rinci, c. Relevan, d. Mutakhir, dan e. Disampaikan tepat waktu 2. Pengabdian kepada Masyarakat berbasis riset
Opportunity	**Strategi SO**	**Strategi WO**

1. Dosen memiliki kemampuan dan potensi untuk melakukan Pengabdian Masyarakat dengan target luaran wajib dan luaran tambahan **2.** Adanya alokasi dana Pengabdian Masyarakat internal **3.** PT melalui LPPM mulai melakukan pelatihan untuk pengembangan SDM dosen di bidang Pengabdian Masyarakat	Membuat kebijakan dan arah pengembangan kelompok pelaksana PkM tingkat FE UPMI serta dukungan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat di Program studi	Membuat keunggulan, kesesuaian arah dan program Pengabdian Masyarakat sesuai dengan visi FE UPMI

Threat	Strategi ST	Strategi WT
1. Perubahan kebijakan terkait Pengabdian kepada Masyarakat secara nasional **2.** Ketatnya persaingan untuk memperoleh pendanaan eksternal dari DRPM Kemendikbud	Membuat keberadaan dan kelompok pelaksana PkM	Membuat kebijakan dan arah pengembangan pelaksana PkM tingkat FE UPMI serta dukungan pada pengembangan dan pelaksanaan PkM di program studi

4.1.8 Bidang Luaran dan Capaian Tridharma

	Strength	Weakness
SWOT dan Strategi **C9. Luaran dan Capaian Tri Dharma**	1. Rata-rata IPK mahasiswa dalam 1 semester terakhir ≥ 3,00 2. Luaran penelitian dosen terpublikasi baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.	1. Belum memiliki lulusan untuk semua program studi 2. Masih minimnya prestasi non akademik mahasiswa 3. Masih minimnya prestasi akademik mahasiswa 4. Masa tunggu lulusan dalam tiga tahun terakhir 5. Masih minimnya mahasiswa yang memperoleh penghargaan di bidang akademik maupun non akademik di tingkat regional dan nasional dalam tiga tahun terakhir 6. Masih minimnya publikasi di seminar dan tulisan di media massa dalam tiga tahun terakhir 7. Masih minimnya jumlah artikel yang disitasi dalam tiga tahun terakhir 8. Masih minimnya luaran penelitian dan pengabdian masyarakat dosen tetap dalam tiga tahun terakhir yang mendapat pengakuan HKI, teknologi tepat guna, produk, karya seni, dan rekayasa sosial, buku, serta book chapter
Opportunity	**Strategi SO**	**Strategi WO**

1. Rata-rata tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan di badan usaha tingkat nasional dan berwirausaha yang	1. Bekerja sama dengan perusahaan/badan usaha bertaraf nasional dan internasional 2. Bisnis start up merupakan implementasi	Pelatihan kerja/magang pada perusahaan yang telah bekerja sama bertaraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang Prodi
2. berizin Lulusan mampu membuka peluang bisnis sebagai wirausaha yang mandiri **3.** Lulusan mampu melakukan digitalisasi bisnis sehingga bisnis akan berkembang lebih baik	kemampuan lulusan 3. Memasukkan mata kuliah tentang IT ke dalam perkuliahan sehingga mahasiswa mampu dengan mudah masuk ke dalam digitalisasi bisnis	
Threat	**Strategi ST**	**Strategi WT**
1. Adanya perubahan kebijakan terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi 2. Penerimaan calon mahasiswa berasal dari lulusan SMA/SMK yang heterogen	Peningkatan kebermanfaatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat oleh pemangku kepentingan dan masyarakat	Peningkatan jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap perwujudan visi dan misi serta kontribusi pengabdian masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

4.2 Arah Pengembangan FE UPMI

Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) FE UPMI ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan seluruh sivitas akademik FE UPMI dalam mewujudkan visi dan misi FE UPMI melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul. RPJP FE UPMI yang diproyeksikan untuk jangka waktu 20 tahun dibagi menjadi lima tahap dalam mendukung rencana pengembangan jangka Panjang UPMI. Setiap tahap berlangsung selama lima tahun dengan sasaran strategis masing-masing yang terus meningkat pada setiap tahapnya. Tahapan dan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1 Menjadi Teaching Faculty (2020 – 2025)

Pada tahap ini fokus penyelenggaraan FE UPMI adalah delivering and transforming of knowledge. Fungsi utama dari sebuah fakultas adalah pelestarian ipteks dan penyebarluasan ipteks melalui pengajaran. Pada tahap ini kebijakan diarahkan kepada pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi serta menghasilkan kualitas lulusan berdaya saing nasional. Perwujudan dari tahap ini tampak dari berbagai komponen pendidikan dan pembelajaran seperti software dan hardware. Sebagai langkah awal dari tahap ini adalah diarahkan kepada penataan organisasi dan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya untuk mendapatkan sistem organsisasi yang sehat dan sumber daya yang berkualitas. Unsur utama dari pengajaran adalah program-program studi dan kelompokkelompok penelitian yang beroperasi secara mono-disipliner. Fokus pengembangan FE UPMI dalam tahap ini adalah memperbaiki struktur teaching process untuk memenuhi standar pengajaran di level nasional dan atau internasional.

4.2.2 Sebagai Excellence Teaching Faculty (2025 – 2030)

FE UPMI sebagai pendukung terjadinya excellence teaching faculty merupakan peningkatan dari teaching faculty. Pada tahap ini FE UPMI diharapkan memiliki ciri keunggulan yang dibangun atas kebutuhan perkembangan isu Pendidikan dunia dan keunikan lokal. FE UPMI diharapkan mampu menciptakan kompetensi dan keunggulan institusi, serta terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak di ranah nasional dan internasional. FE UPMI diharapkan mampu berdaya saing nasional dan internasional dalam proses pembelajaran, mendapatkan rekognisi sebagai kampus yang dapat diakses oleh mahasiswa asing, serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi yang dicirikan oleh keunikan lokal, didukung oleh kompetensi moralitas dan karakter yang kuat dan berjiwa kewirausahaan. Untuk mencapai kondisi ini FE UPMI harus memiliki standar akademik unggul (excellent academic standard) yang setara dengan fakultas yang telah established di tingkat nasional maupun internasional.

FE UPMI harus memiliki penciri yang membedakannya dengan fakultas lain.Di samping tetap melanjutkan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi. FE UPMI juga harus memulai pengembangan program-program yang berorientasi keunggulan Internasional, Kerjasama-kerjasama internasional dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik yang melibatkan dosen maupun mahasiswa dalam berbagai bentuk misalnya internship, student exchange, ataupun academic staff exchange mulai ditingkatkan dan disusun dalam rencana strategis terkait dengan rekognisi kerja sama internasional. FE UPMI harus mampu mengembangkan/menciptakan program-program unggul dan unik (yang tidak dimiliki oleh institusi lain) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menarik minat mitra internasional untuk menjalin kerjasama dengan FE UPMI.

4.2.3 Menuju Research Faculty (2030 – 2035)

Setelah tercapainya excellence teaching Faculty, pengembangan FE UPMI dilanjutkan dengan tahapan awal pengembangan mendukung Research Faculty pada RIP FE UPMI. Pada tahap ini, FE UPMI tidak hanya melanjutkan dan meningkatkan pencapaian-pencapaian dalam bentuk delivering and transforming of knowledge (teaching faculty), tetapi juga mulai memberi nilai tambah yang berbentuk creating knowledge. Untuk memulai tahap research faculty para dosen FE UPMI harus tergabung dalam kelompok-kelompok keahlian, agar penelitian dosen FE UPMI terfokus pada bidang ilmu dan keahlian yang semakin mendalam. Setiap kelompok-kelompok keahlian FE UPMI harus memiliki roadmap pengembangan keilmuannya melalui penelitian, paling tidak untuk jangka waktu 5 tahun. Kelompok-kelompok penelitian berinteraksi secara interaktif dan dinamis untuk menghasilkan ipteks baru. Selain itu, ciri khas dari tahap ini adalah kegiatan pengajaran di program-program studi diintegrasikan dengan pusat-pusat pengabdian masyarakat dan kegiatan penciptaan ipteks. Hasil-hasil penelitian diharapkan sudah mulai menghilir untuk memecahkan permasalahan paling tidak pada tingkat local, nasional, dan internasional. Pengabdian kepada masyarakat harus didasarkan pada hasil-hasil penelitian.

Pada tahap ini pengembangan FE UPMI memberi prioritas tinggi kepada penemuan-penemuan pengetahuan baru dan menghasilkan sumber daya manusia bergelar doktor. Selain memperbaiki SDM yang ada, maka FE UPMI diharapkan memiliki program studi sekelas master dan atau doctoral untuk mendukung siklus penelitian yang didapatkan dari produk pembelajaran. Tahap ini ditandai oleh tingginya kontribusi research dalam memperkaya body of knowledge secara kuantitatif dalam bentuk jumlah publikasi maupun secara kualitatif dalam bentuk citation index. Riset FE UPMI harus diarahkan pada fokus yang jelas baik dalam research dasar maupun terapan. Dengan keberadaan

beberapa produk yang telah di HKI kan, FE UPMI mendapatkan banyak hak paten, dan hal tersebut dapat mendukung Langkah kewirausahaan FE UPMI untuk mendapatkan biaya operasional selain dari mahasiswa.

Pada fase ini diharapkan FE UPMI telah memiliki Pusat-pusat kajian dengan tenaga akademik yang mumpuni harus menjadi prioritas. Di samping sudah terpenuhi standar nasional pendidikan tinggi, sumber daya FE UPMI harus ditingkatkan untuk mendukung upaya creating body of knowledge dan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi doktor dalam berbagai bidang ilmu. Pusat-pusat penelitian harus didukung oleh sarana prasarana yang memadai, memiliki laboratorium yang lengkap sesuai dengan kebutuhan, didukung oleh jumlah profesor dan doktor dengan spesialisasi akademik maupun praktisi yang tepat. Pada tahap ini para peneliti FE UPMI harus mampu memberikan jawaban terhadap masalah-masalah lokal, nasional, dan global. Sebagai research faculty, FE UPMI diharapkan menjadi pusat keunggulan pengembangan dan penerapan ipteks yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan Manajemen.

4.2.4 Menjadi Excellence Research Faculty (2035 – 2040)

Dalam tahap ini, FE UPMI menjadi fakultas yang memfokuskan pada penelitian dosen-dosen penelitian dan mahasiswa serta tetap memberikan perhatian pada program pendidikan dengan pelayanan yang baik. FE UPMI sebagai salah satu fakultas terbaru di lingkungan FE UPMI juga melakukan pengembangan, dengan melakukan penelitian kolaborasi oleh mahasiswa, pusat penelitian dan laboratorium, dosen peneliti yang memiliki reputasi nasional serta reputasi internasional.

Pada tahap ini diharapkan FE UPMI, memiliki luaran riset yang berdampak besar bagi proses pengambilan kebijakan oleh stake holder di lingkup nasional dan atau internasional. Pada tahap ini FE UPMI berharap kegiatan civitas akademika dengan lingkup tri dharma telah melibatkan kegiatan-kegiatan internasional mulai kerja sama, publikasi pada jurnal yang memiliki impact factor tinggi, citation index dalam kategori tinggi, dan keahlian dalam pengintegrasian tridharma oleh dosen yang semakin mendalam. Dengan produk riset yang berstandar internasional, diharapkan FE UPMI beserta seluruh akademisi dapat menjadi sosok yang diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan khususnya bidang ekonomi dan bisnis di tingkat local, nasional dan bahkan internasional.

4.3 Strategi dan Indikator Kinerja Induk

4.3.1 Bidang Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Strategi pengembangan	Indikator Kinerja Induk			
	Tahun 2020-2025	Tahun 2025-2030	Tahun 2030-2035	Tahun 2035-2040
Meningkatkan kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran FE UPMI	FE UPMI memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan menuju Teaching Faculty	FE UPMI memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan sebagai Excellence Teaching Faculty	FE UPMI memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan menuju Research Faculty	FE UPMI memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan menuju Excellence Research Faculty

Meningkatkan pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan FE UPMI untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka mewujudkan visi dan penyelenggaraan visi.	Memiliki strategi dan target pencapaian	Memiliki strategi dan target pencapaian yang berorientasi pada daya saing nasional	Meningkatkan strategi dan target pencapaian yang berorientasi pada daya saing nasional	Memiliki strategi dan target pencapaian yang berorientasi pada daya saing internasional
Strategi pengembangan	**Indikator Kinerja Induk**			
	Tahun 2020-2025	**Tahun 2025-2030**	**Tahun 2030-2035**	**Tahun 2035-2040**
Memiliki -strategi dan target pencapaian yang berorientasi pada daya saing nasional	Memiliki strategi dan target pencapaian	Memiliki strategi dan target pencapaian yang berorientasi pada daya saing nasional	Meningkatkan strategi dan target pencapaian yang berorientasi pada daya saing nasional	Memiliki strategi dan target pencapaian yang berorientasi pada daya saing internasional
Mengadopsi visi, misi, tujuan dan sasaran FE UPMI sebagai pedoman pengembangan unit-unit di dalam lingkungan FE UPMI	Setiap pelaksanaan Rencana pengembangan memiliki dokumen KAK dan Laporan	Setiap pelaksanaan rencana pengembangan memiliki dokumen KAK dan Laporan	Setiap pelaksanaan rencana pengembangan memiliki dokumen dan Laporan	Setiap pelaksanaan rencana pengembangan memiliki dokumen KAK dan Laporan

4.3.2 Bidang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

Strategi Pengembangan	Indikator Kinerja Induk			
	Tahun 2020-2025	Tahun 2025-2030	Tahun 2030-2035	Tahun 2035-2040
1. Memastikan kelengkapan struktur dan organ FE UPMI untuk dapat mewujudkan prinsipprinsip tata pamong yang baik dan efektif.	Dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	1. Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks FE UPMI untuk menjamin akuntabilitas,keberlanjutan dan transparansi, serta	1. Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks FE UPMI untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan	1. Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks FE UPMI untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta

Strategi Pengembangan	Indikator Kinerja Induk			
	Tahun 2020-2025	Tahun 2025-2030	Tahun 2030-2035	Tahun 2035-2040
pamong dan tata kelola perguruan tinggi,			Keterlaksanaan kebijakan dan peraturan	peraturan secara konsisten.

	2. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja FE UPMI beserta tugas dan fungsinya	2. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja FE UPMI beserta tugas dan fungsinya, serta terlaksananya fungsi perguruan tinggi berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja FE UPMI	2. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja FE UPMI beserta tugas dan fungsinya., serta terlaksananya fungsi perguruan tinggi berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja FE UPMI .	2. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya, serta terlaksananya fungsi perguruan tinggi berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja FE UPMI secara konsisten	2. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya, serta terlaksananya fungsi perguruan tinggi berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja FEB UDS secara konsisten, efektif dan efisien.
	3. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik	3. memiliki bukti yang sahih terkait praktik penyelenggaraan	3. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih terkait	3. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih terkait praktik	3. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih terkait

Strategi Pengembangan	Indikator Kinerja Induk			
	Tahun 2020-2025	Tahun 2025-2030	Tahun 2030-2035	Tahun 2035-2040

	baik perwujudan Good Faculty Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3).	GFG namun hanya mencakup beberapa aspek GFG (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan,dan manajemen risiko). Setiap pelaksanaan GFG memiliki dokumen formal	praktik penyeleng garaan GFG namun hanya mencakup beberapa aspek GFG (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan,dan manajemen risiko). Setiap pelaksanaan GFG memiliki dokumen formal (laporan tahunan). Serta di lengkapi ringkasan laporan.	penyelenggaraan GFG namun hanya mencakup beberapa aspek GFG (kredibili-tas), transparansi, akuntabilitas , tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko). Setiap pelaksanaan GFG memiliki dokumen formal (laporan tahunan). Ringkasan laporan tahunan di umumkan kepada masyarakat yang di laksanakan secara konsisten.

Strategi Pengembangan	Indikator Kinerja Induk				
	Tahun 2020-2025	Tahun 2025-2030	Tahun 2030-2035	Tahun 2035-2040	

	4. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas	4. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. Setiap pelaksanaannya memiliki dokumen formal	4. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. Setiap pelaksanaan sepenuhnya di semua sendi kehidupan FE UPMI memiliki dokumen formal.	4. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. Setiap pelaksanaan sepenuhnya di semua sendi Kehidupan FE UPMI memiliki Dokumen formal secara konsisten.
	5. Efektivitas kepemimpinan operasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan	5. Pimpinan mampu merealisasikan rencana strategis dan operasional melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan	5. Pimpinan mampu merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta	5. Pimpinan merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu

Strategi Pengembangan	Indikator Kinerja Induk				
	Tahun 2020-2025	Tahun 2025-2030	Tahun 2030-2035	Tahun 2035-2040	

	stakeholders internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional.	kebijakan operasional. Setiap pelaksanaan Renstra dan Renop memiliki dokumen formal.	mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional. Setiap pelaksanaan Renstra dan Renop memiliki dokumen formal.	mengambil keputusan strategis dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional. Setiap pelaksanaan Renstra dan Renop memiliki dokumen formal
	6. Efektivitas kepemimpinan organisasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan	6. Pimpinan mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi. Pimpinan	6. Pimpinan mampu mengambil keputusan strategis dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin	6. Pimpinan mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan

Strategi Pengembangan	Indikator Kinerja Induk				
	Tahun 2020-2025	Tahun 2025-2030	Tahun 2030-2035	Tahun 2035-2040	

	kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis FE UPMI.	mampu berperan sebagai motivator untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis FE UPMI. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal.	keberlanjutan dan eksistensi FE UPMI. Pimpinan mampu berperan sebagai motivator untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis FE UPMI. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal.	eksistensi FE UPMI. Pimpinan mampu berperan sebagai motivator untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis FE UPMI. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal.
	7. Efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama	7.Pimpinan menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan. Setiap pelaksanaan	7.Pimpinan menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma, dan menjadikan FE UPMI sebagai rujukan publik di	7. Pimpinan menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan FE UPMI sebagai rujukan

Strategi Pengembangan	Indikator Kinerja Induk				
	Tahun 2020-2025	Tahun 2025-2030	Tahun 2030-2035	Tahun 2035-2040	

	tridharma dan menjadikan FE UPMI menjadi rujukan publik.	memiliki dokumen formal.	tingkat wilayah/nasional. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal.	publik di tingkat wilayah/nasional. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal.
	8. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional FE UPMI yang mencakup 5 aspek sebagai berikut : 1) perencanaan (planning), 2) pengorg anisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing)	8. FE UPMI memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional organisasi yang mencakup 5 aspek Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal.	8. FE UPMI memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional organisasi yang mencakup 5 aspek. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal dan konsisten	8. FE UPMI memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional organisasi yang mencakup 5 aspek. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal, konsisten, efektif, dan efisien.

Strategi Pengembangan	**Indikator Kinerja Induk**				
	Tahun 2020-2025	**Tahun 2025-2030**	**Tahun 2030-2035**	**Tahun 2035-2040**	

	4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).			
	9.Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) Kemahasiswaan 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) Sarana dan prasarana, 9) sistem informasi	9. FE UPMI memiliki dokumen formal dan pedoman engelolaan mencakup 11 aspek. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal	9. FE UPMI memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal dan konsisten	9. FE UPMI memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci mencakup 11 aspek. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal, konsisten, efektif, dan efisien.

Strategi Pengembangan	Indikator Kinerja Induk				
	Tahun 2020-2025	Tahun 2025-2030	Tahun 2030-2035	Tahun 2035-2040	

	10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.			
	10. Ketersediaan bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM,	10. FE UPMI memiliki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan 11 aspek. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal	10. FE UPMI memiliki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan 11 aspek. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal dan konsisten	10. FE UPMI memiliki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal, konsisten, efektif, dan efisien

Strategi Pengembangan	Indikator Kinerja Induk				
	Tahun 2020-2025	Tahun 2025-2030	Tahun 2030-2035	Tahun 2035-2040	

	7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, da n 11) Kerjasama			
	11. Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode	11. FE UPMI memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal	11. FE UPMI memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal dan konsisten	11. FE UPMI memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan institusi sejenis tingkat nasional. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal, konsisten, efektif, dan efisien

Strategi Pengembangan	**Indikator Kinerja Induk**				
	Tahun 2020-2025	**Tahun 2025-2030**	**Tahun 2030-2035**	**Tahun 2035-2040**	

	sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS FE UPMI, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan			
3. Memastikan kelengkapan dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal serta konsistensi dan keefektifan implementasinya, serta	1. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	1. FE UPMI telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal. 2. FE UPMI memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan	1. FE UPMI telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal dan konsisten 2. FE UPMI memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di	1. FE UPMI telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing nasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembang kan budaya mutu. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen

Strategi Pengembangan	Indikator Kinerja Induk			
	Tahun 2020-2025	Tahun 2025-2030	Tahun 2030-2035	Tahun 2035-2040

	2. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di FE UPMI melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi : 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat	pembahasan sebagian dari 7 unsur.	FE UPMI melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal dan konsisten	formal, konsisten efektif, dan efisien 2. FE UPMI memiliki buktiyang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal, konsisten, efektif, dan efisien

Strategi Pengembangan	Indikator Kinerja Induk				
	Tahun 2020-2025	Tahun 2025-2030	Tahun 2030-2035	Tahun 2035-2040	

	mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan			
	3. Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi. NK < 8	3. Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi. NK < 8	3. Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi. NK ≦ 8	3. Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi. NK ≧ 8
	NK=4xNA +2xNB +NC NA = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi. NB = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi. NC = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi.			

Strategi Pengembangan	Indikator Kinerja Induk			
	Tahun 2020-2025	Tahun 2025-2030	Tahun 2030-2035	Tahun 2035-2040

	4. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi. PAI < 5%	4. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi. PAI < 5%	4. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi. PAI ≦ 5%	4. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi. PAI ≧ 5%	
	PAI=(NAI/NPS)x100% NAI = Jumlah program studi pada program utama yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi. NPSU = Jumlah program studi pada program utama				
	5. Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi JikaRI<adanRN □b,makaSkor=3+(RI /a).	5. Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan FEB UDS ke pemangku kepentingan internal. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal	5. Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan FE UPMI ke pemangku kepentingan internal. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal dan konsisten	5. Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan FE UPMI ke pemangku kepentingan internal dan eksternal. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal, konsisten, efektif, dan efisien	

Strategi Pengembangan	**Indikator Kinerja Induk**				
	Tahun 2020-2025	**Tahun 2025-2030**	**Tahun 2030-2035**	**Tahun 2035-2040**	

	6. Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). NSA < 3,50	6. Jika NSA < 3,50 , maka Skor = NSA + 0,5 .	6. Jika NSA □ 3,50 , maka Skor = 4 .	6. Jika NSA > 3,50 , maka Skor = 4 .	
	NSA =(4xNUnggul +3,5xNA +3xNBaik_Sekali +2,5xNB +2xNBaik +1,5xNC)/(NUnggul +NA +NBaik_Sekali +NB +NBaik +NC +NK) Nunggul = Jumlah program studi terakreditasi Unggul. NBaik_Sekali = Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali. NBaik = Jumlah program studi terakreditasi Baik. NA = Jumlah program studi terakreditasi A NB = Jumlah program studi terakreditasi B NC = Jumlah program studi terakreditasi C NK = Jumlah program studi tidak terakreditasi/kadaluarsa. Catatan : program studi baru dengan status terakreditasi minimum tidak dimasukkan dalam perhitungan NSA.			
	7. Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAMEMBA). NSA < 3,50	7. Jika NSA < 3,50 , maka Skor = NSA + 0,5 .	7. Jika NSA < 3,50 , maka Skor = NSA + 0,5 .	7. Jika NSA □ 3,50 , maka Skor = 4 .	

Strategi Pengembangan	Indikator Kinerja Induk				
	Tahun 2020-2025	Tahun 2025-2030	Tahun 2030-2035	Tahun 2035-2040	
	NSA =(4xNUnggul +3,5xNA +3xNBaik_Sekali +2,5xNB +2xNBaik +1,5xNC)/(NUnggul +NA +NBaik_Sekali +NB +NBaik +NC +NK) NUnggu = Jumlah program studi terakreditasi Unggul.				

	NBaik_Sekali = Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali. NBaik = Jumlah progr ım studi terakreditasi Baik. NA = Ju nlah program studi terakreditasi A. NB = Ju nlah program studi terakreditasi B. NC = Ju nlah program studi terakreditasi C. NK = Ju ılah program studi tidak terakreditasi/kadaluarsa. i baru dengan status terakreditasi minimum tidak dimasukkan dalam perhitungan NSA. Catatan: program stud			
	8. Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh FE UPMI pada tiap kriteria	8. FE UPMI mengikuti penetapan standar mutu FE UPMI melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan	8. FE UPMI mengikuti penetapan standar mutu UPMI yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan	8. FE UPMI mengikuti penetapan standar mutu UPMI yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan	

Strategi Pengembangan	**Indikator Kinerja Induk**				
	Tahun 2020-2025	**Tahun 2025-2030**	**Tahun 2030-2035**	**Tahun 2035-2040**	

		berkelanjutan. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal	Telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal dan konsisten	berkelanjutan. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal, konsisten, efektif, dan efisien
	9. Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi pada tiap kriteria yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1)	9. Analisis pencapaian kinerja FE UPMI yang memenuhi 2 aspek. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal	9. Analisis pencapaian kinerja FE UPMI yang memenuhi 2 aspek. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal dan konsisten	9. Analisis pencapaian kinerja FE UPMI yang memenuhi 2 aspek dan dilaksanakan setiap tahun. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal, konsisten,efektif, dan efisien

Strategi Pengembangan	**Indikator Kinerja Induk**			
	Tahun 2020-2025	**Tahun 2025-2030**	**Tahun 2030-2035**	**Tahun 2035-2040**

	capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan, 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.			
	10. Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek sebagai	10. FE UPMI telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek. Setiap pelaksanaan	10. FE UPMI telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek. Setiap	10. FE UPMI telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus

Strategi Pengembangan	Indikator Kinerja Induk			
	Tahun 2020-2025	Tahun 2025-2030	Tahun 2030-2035	Tahun 2035-2040

	berikut:1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu	memiliki dokumen formal	pelaksanaan dan memiliki dokumen form konsisten	penjaminan mutu. Setiap pelaksanaan memiliki dokumen formal, konsisten, efektif, dan efisien
	11. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama,	11. FE UPMI melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek.	11. FE UPMI melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing	11. FE UPMI melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek

		Panduan Layanan Kemahasiswaan dan Alumni FEB UDS	dan dilaksanakan secara rutin setiap akhir pelaksanaan yudisium. Pelaksanaan Job Fair melibatkan tempat kerja badan usaha internasional/multinasional, tingkat nasional/berwirausaha yang berizin, tingkat wilayah/local atau berwirausaha tidak berizin
3	Penetapan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Peraturan Rektor tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Surat Edaran Dekan FE UPMI terkait dengan target luaran bagi dosen dan mahasiswa	Pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat yang berisikan kewajiban setiap dosen melakukan publikasi di jurnal, seminar/tulisan di media massa, luaran yang mendapat pengakuan HKI, bentuk teknologi tepat guna, produk, karya seni, dan rekayasa sosial, serta diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN/Book Chapter
4	Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam hal etika, kompetensi utama, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri	Peraturan Rektor tentang Peningkatan Kemampuan Mahasiswa dan jenjang karir Panduan kemahasiswaan FE UPMI	Peningkatan kemampuan mahasiswa yang memuat terkait etika, kompetensi utama, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri
5	Peningkatan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa	Peraturan Rektor tentang Kewajiban Mahasiswa dalam Peningkatan Prestasi Akademik dan Non akademik Mahasiswa Panduan kemahasiswaan FE UPMI	Kewajiban mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan atau internasional

PENUTUP

Rencana Induk Pengembangan (RIP) ini kami susun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pada rapat pimpinan FE UPMI. Dengan senantiasa mengharap pertolongan Allah SWT dengan penuh tawakkal diiringi dengan ikhtiar manajeman berupaya untuk mengerahkan segala potensi yang dimiliki guna mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya demi kebermanfaatan bagi peserta didik dan masyarakat serta kemajuan bersama khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaran tridharma di FE UPMI.

Besar harapan kami RIP FE UPMI ini mampu menjadi gambaran arah pengembangan jangka Panjang dan proyeksi perjalanan estafet bagi operasional FE UPMI nantinya. RIP ini disusun mengacu pada STATUTA dan RIP UPMI, dengan memperhatikan fleksibilitas dan kondisi pengembangan terkait kondisi peraturan Pendidikan tinggi dan perkembangan dunia ekonomi dan bisnis terkini. Kedepannya, RIP ini dapat dirubah sesuai dengan perubajan kondisi dan arah pengembangan terkini mengikuti kebijakan dan kebutuhan operasional FE UPMI.

Semoga segala upaya yang dilakukan manajemen dalam mengelola, memajukan, dan mengembangkan perguruan tinggi ini dapat memperoleh hasil yang diharapkan yaitu menghasilkan generasi SDM dan IPTEKS yang berakhlakul karimah. Tidak lupa penyusun ucapkan terima kasih bagi penyusun dan segala pihak yang telah membantu dalam pembentukan RIP ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan dengan arah pengembangan yang lebiha baik bagi FE UPMI.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 30 Januari 2020
Dekan FE UPMI,

Budi Alamsyah Siregar, S.E., M.M.

DAFTAR PUSTAKA

Instrumen Akreditasi BAN-PT 9 kriteria

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 tentang akreditasi dan perguruan tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

Statuta UPMI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi